

Dinamika Kekuasaan dalam Penyelesaian Konflik Antar Agama

Elva Imeldatur Rohmah

UIN Sunan Ampel Surabaya
elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id

Diterima 20 November 2023 | Direview 10 November 2023 | Diterbitkan 30 Desember 2023

Abstract

This article attempts to address issues related to power asymmetry in the resolution of interreligious conflicts and the mechanisms used to resolve such conflicts. The research is conducted using a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The state has an important role in resolving inter-religious conflicts through public policies involving legislation, law enforcement, promotion of inter-religious dialogue, and protection of human rights. In the resolution of interreligious conflicts, there is often a power asymmetry between the involved religious groups. Power asymmetry refers to the imbalance of political, economic, or social power between conflicting religious groups. This imbalance can influence the dynamics of conflict resolution and create challenges that need to be overcome. Common mechanisms used in the resolution of interreligious conflicts include interfaith dialogue, reconciliation, mediation, and a restorative justice approach. In the resolution of interreligious conflicts, each mechanism has its own uniqueness and advantages.

Keywords: Conflict; Power; Religion

Abstrak

Tulisan ini mencoba untuk menjawab permasalahan terkait adanya asimetri kekuasaan dalam penyelesaian konflik antar agama serta mekanisme penyelesaian konflik antar agama. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Negara memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik antar agama melalui kebijakan publik yang melibatkan legislasi, penegakan hukum, promosi dialog antar agama, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam penyelesaian konflik antar agama, sering kali terdapat asimetri kekuasaan antara kelompok agama yang terlibat. Asimetri kekuasaan merujuk pada ketidakseimbangan kekuatan politik, ekonomi, atau sosial antara kelompok agama yang berkonflik. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi dinamika penyelesaian konflik dan menciptakan tantangan yang perlu diatasi. Mekanisme yang umum digunakan dalam penyelesaian konflik antar agama antara lain dengan dialog antar agama, rekonsiliasi, mediasi, dan pendekatan restorative justice. Dalam penyelesaian konflik antar agama, setiap mekanisme memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing.

Kata Kunci: Agama; Kekuasaan; Konflik

Pendahuluan

Konflik antar agama di Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks dan beragam. Sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, sejarah dan faktor-faktor tertentu telah berkontribusi terhadap terjadinya konflik tersebut. Salah satu latar belakang penting adalah kolonialisme Belanda. Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan kebijakan pemisahan dan pengaturan agama di Indonesia. Mereka memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap pemeluk agama-agama, seperti memberikan keistimewaan kepada umat Islam dan membatasi kegiatan misi Kristen. Kebijakan ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang kemudian menjadi pemicu ketegangan antara kelompok agama.¹

Selain itu, perubahan politik dan sosial di Indonesia pasca-kemerdekaan juga berkontribusi pada konflik antar agama.² Proses nasionalisasi dan identitas kebangsaan yang sedang berlangsung di Indonesia menciptakan pergeseran dalam dinamika keagamaan. Beberapa kelompok masyarakat mulai menekankan identitas agama mereka dan menganggap agama sebagai basis utama identitas dan afiliasi sosial. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesadaran dan ketegangan agama, terutama ketika ada perbedaan pandangan dan kepentingan yang saling bertentangan antara kelompok-kelompok agama. Faktor ekonomi, politik, dan sosial juga berperan dalam menciptakan konflik antar agama. Persaingan atas sumber daya ekonomi, akses ke pendidikan, lapangan kerja,

¹Mochamad Rizak, "Peran Pola Komunikasi Antarbudaya Dalam Mencegah Konflik Antar Kelompok Agama," *Islamic Communication Journal* 3, no. 1 (2018): 95, <https://doi.org/10.21580/icj.2018.3.1.2680>.

²Nadia Illsye Tular and Jefri Susanto Manik, "Pendidikan Perdamaian Bagi Remaja: Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik Antar Umat Beragama," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 5, no. 1 (2022): 52, <https://doi.org/10.34081/fidei.v5i1.228>.

dan kekuasaan politik sering kali dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok agama.³ Dalam beberapa kasus, kelompok agama tertentu merasa diperlakukan secara tidak adil dalam hal ekonomi dan politik, yang kemudian memunculkan ketegangan dan konflik antara kelompok tersebut. Ketidappahaman, stereotip, dan prasangka juga merupakan faktor latar belakang yang penting. Kurangnya pengetahuan tentang agama-agama lain, persepsi yang salah, dan ketakutan terhadap perbedaan dapat memicu ketegangan dan konflik. Terkadang, kelompok ekstremis atau individu dengan agenda politik tertentu juga dapat memanfaatkan situasi ini untuk memperkeruh ketegangan dan memicu konflik antar agama. Pada dasarnya, latar belakang konflik antar agama tidak seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki dinamika dan konteks khusus yang mempengaruhi konflik antar agama.⁴

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus konflik antar agama yang telah terjadi dalam sejarah negara ini. Salah satu kasus yang terkenal adalah kerusuhan etnis dan agama di Ambon pada tahun 1999 hingga awal 2000. Konflik ini melibatkan kelompok agama Kristen dan Muslim di Maluku, khususnya di Kota Ambon dan sekitarnya. Kerusuhan ini berawal dari insiden sengketa lahan yang melibatkan pemilik rumah ibadah Kristen dan Muslim. Ketegangan kemudian memuncak menjadi bentrokan fisik antara kedua kelompok, yang menyebabkan ribuan orang tewas dan banyak infrastruktur hancur. Konflik ini terus berlanjut selama beberapa tahun dan membutuhkan upaya besar dari pemerintah dan komunitas masyarakat untuk memulihkan perdamaian.⁵

Selain itu, kasus kerusuhan Poso di Sulawesi Tengah juga menjadi contoh konflik antar agama yang serius di Indonesia. Konflik ini berawal pada tahun 1998 dan terus berlanjut selama beberapa tahun, melibatkan kelompok agama Kristen dan Muslim di daerah tersebut. Konflik ini ditandai dengan serangan terhadap gereja-gereja dan masjid-masjid, pembunuhan massal, dan perusakan properti. Ribuan orang tewas dan jutaan orang terpaksa mengungsi.⁶ Pemerintah kemudian melakukan intervensi dan mengirimkan pasukan keamanan untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan keamanan.⁷ Selain itu, serangan teroris yang terkait dengan konflik agama juga telah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah serangan bom Bali pada tahun 2002, di mana sekelompok teroris Islam menyerang klub malam dan restoran di Pulau Bali yang dikenal sebagai tujuan wisata. Serangan ini menewaskan lebih dari 200 orang, termasuk turis asing, dan melukai ratusan lainnya. Serangan-serangan teroris lainnya juga terjadi di berbagai tempat di Indonesia, menargetkan tempat ibadah, kepolisian, dan kelompok agama minoritas.⁸

Beberapa penelitian yang membahas tentang konflik agama antara lain: Politisasi Isu Agama di Media Massa Strategi Politik Hos Cokroaminoto dalam Surat Kabar Djawi Hisworo 1918,⁹ Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama di Indonesia,¹⁰ Membangun Hubungan

³St. Aisyah BM, "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama," *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): 195, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>.

⁴Khairah Husin, "Peran Mukti Ali Dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama Di Indonesia," *Jurnal Ushuluddin* 21, no. 1 (2014): 111, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/729>.

⁵Vita Justisia, "Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 2, no. 2 (2018): 156, <https://doi.org/10.19109/jssp.v2i2.4058>.

⁶Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 131, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

⁷Muhammad Chairul Huda, "Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan Dalam Upaya Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018): 80, <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160>.

⁸Firdaus M Yunus, "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya," *Substantia* 16, no. 2 (2014): 221.

⁹Ahmad Fajar, "Politisasi Isu Agama Di Media Massa: Strategi Politik Hos Cokroaminoto Dalam Surat Kabar Djawi Hisworo (1918)," *Journal of Islamic History* 1, no. 1 (2021): 78–100, <https://doi.org/10.53088/jih.v1i1.115>.

¹⁰Husin, "Peran Mukti Ali Dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama Di Indonesia."

Antar Agama Mewujudkan Dialog dan Kerjasama,¹¹ Pendidikan Perdamaian bagi Remaja Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik antar Umat Beragama,¹² Analisis Konflik dan Solusi Pemolisian dalam Konflik Antar Agama di Tanjung Balai Sumatera Utara Tahun 2016,¹³ Agama Dan Konflik Sosial,¹⁴ Memahami Konflik Antar Iman Menyikapi Perbedaan Sebagai “Rahmat” Dan Bukan “Konflik”,¹⁵ dan Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya.¹⁶

Berdasarkan penelusuran tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang “Dinamika Kekuasaan Dalam Penyelesaian Konflik Antar Agama”. Sehingga penulis berharap penelitian ini mampu mengisi celah kosong sehingga mampu melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penulis melakukan analisis dokumen yang menyediakan wawasan tentang peristiwa, kebijakan, dan tindakan yang relevan dalam penyelesaian konflik antar agama. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis yang mendalam dan sistematis. Secara keseluruhan, melalui pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam dan makna dalam konteks sosial, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kekuasaan dalam penyelesaian konflik antar agama.

Konflik Antar Agama di Indonesia

Di Indonesia, konflik antar agama telah menjadi salah satu isu yang kompleks dan sensitif dalam sejarah. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman agama yang kaya, yakni mayoritas Muslim dengan minoritas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama-agama tradisional, namun terkadang perbedaan agama ini juga menjadi sumber ketegangan dan konflik. Salah satu akar konflik antar agama di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa kolonial Belanda. Pada masa itu, kebijakan kolonialisme Belanda yang memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap pemeluk agama-agama, seperti memberikan keistimewaan kepada umat Islam dan membatasi kegiatan misi Kristen, telah menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kebijakan ini kemudian mengakibatkan ketegangan antara kelompok agama dan menjadi salah satu faktor pemicu konflik. Selain itu, sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, ada beberapa konflik antar agama yang dipicu oleh perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Terkadang, perbedaan dalam interpretasi agama dan persaingan kepentingan politik di antara pemimpin agama juga menjadi faktor yang memperkeruh situasi. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah yang memiliki komunitas agama yang beragam.¹⁷

Pada dasarnya, politik dapat memiliki dampak signifikan terhadap konflik antar agama, terutama melalui persaingan politik, instrumentalisme agama, dan politisasi identitas agama. Ketika politik digunakan secara negatif atau dengan motivasi yang salah, hal ini dapat memperkeruh perbedaan agama dan menyebabkan konflik. Persaingan politik dapat menjadi faktor pemicu konflik antar agama. Dalam konteks demokrasi, partai politik sering kali menggunakan isu-isu

¹¹Taslim HM. Yasin, “Membangun Hubungan Antar Agama Mewujudkan Dialog Dan Kerjasama,” *Jurnal Substantia* 12, no. 1 (2011): 85–91.

¹²Tular and Manik, “Pendidikan Perdamaian Bagi Remaja: Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik Antar Umat Beragama.”

¹³I Made Redi Hartana, “Analisis Konflik Dan Solusi Pemolisian Dalam Konflik Antar Agama Di Tanjung Balai Sumatera Utara Tahun 2016,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. April (2017): 55–63, <http://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/98>.

¹⁴Stephanus Turibus Rahmat, “Agama Dan Konflik Sosial,” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio* 8, no. 1 (2016): 132–43.

¹⁵Taufiq Saefuddin, “Memahami Konflik Antar Iman: Menyikapi Perbedaan Sebagai ‘Rahmat’ Dan Bukan ‘Konflik,’” *Jurnal Al Adyan; Jurnal Sosial Dan Agama* 1, no. 02 (2015), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/adyan/article/view/1331>.

¹⁶Yunus, “Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya.”

¹⁷Bahtiar Effendy, “Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Politi Islam Di Indonesia,” 1998, 69–70.

keagamaan untuk memperoleh dukungan politik. Mereka mungkin memanfaatkan ketegangan atau perbedaan agama untuk memperkuat basis elektoral mereka atau menggalang dukungan dari kelompok agama tertentu. Hal ini dapat menciptakan polarisasi dan meningkatkan ketegangan antar agama, terutama ketika partai politik terlibat dalam retorika atau tindakan yang memprovokasi atau memicu konflik.¹⁸

Dalam konteks demokrasi, partai politik sering kali berusaha memanfaatkan isu-isu keagamaan untuk keuntungan politik mereka. Mereka menggunakan identitas keagamaan sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dan meningkatkan basis elektoral mereka. Dalam prosesnya, mereka dapat menghidupkan kembali atau memperkuat perbedaan dan ketegangan antar agama. Partai politik juga sering kali menggunakan retorika atau tindakan yang memprovokasi atau memicu konflik antar agama. Hal tersebut digunakan untuk membuat ketegangan yang sudah ada dalam masyarakat atau bahkan menciptakan perbedaan baru untuk memanipulasi opini publik dan memperoleh dukungan. Dalam situasi ini, partai politik tidak hanya menciptakan polarisasi antar agama, tetapi juga dapat mengintensifkan ketegangan yang sudah ada. Ketika partai politik terlibat dalam retorika yang menentang kelompok agama lain atau menghasut sentimen keagamaan, mereka dapat menggerakkan massa dan menciptakan situasi yang berpotensi berujung pada konflik. Perilaku semacam ini dapat meningkatkan ketegangan, memperdalam kesenjangan, dan mempengaruhi hubungan antar komunitas agama.¹⁹

Instrumentalisme agama juga dapat mempengaruhi konflik antar agama. Agama digunakan sebagai alat atau alasan untuk mencapai tujuan politik atau kepentingan pribadi. Aktor politik atau kelompok masyarakat dapat memanipulasi sentimen agama untuk memperoleh kekuasaan, menggerakkan massa, atau membenarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai toleransi dan keadilan. Penyalahgunaan agama dalam politik sering kali menciptakan ketegangan dan konflik antar agama. Dalam situasi ini, agama dijadikan alat atau sarana untuk mencapai tujuan politik atau kepentingan pribadi, dengan mengabaikan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan keadilan. Aktor politik atau kelompok masyarakat yang melakukan instrumentalisme agama menggunakan narasi agama untuk memperkuat identitas kelompok mereka sendiri atau menunjukkan bahwa tujuan politik atau tindakan mereka memiliki dukungan agama. Penyalahgunaan agama dalam politik dapat menciptakan ketegangan dan konflik antar agama. Ketika agama dijadikan alat politik, pandangan yang sempit dan eksklusif tentang agama sering kali muncul, menyebabkan penolakan dan ketidakpercayaan antar kelompok agama. Hal ini memperdalam kesenjangan antara komunitas agama, menghambat dialog, dan melemahkan kerukunan yang ada dalam masyarakat.²⁰

Selain itu, politisasi identitas agama juga dapat memainkan peran dalam konflik antar agama. Ketika agama menjadi basis utama identitas politik, individu dan kelompok dapat terjebak dalam dinamika kompetisi dan konflik yang didasarkan pada identitas agama mereka. Politisasi identitas agama sering kali memperkuat perbedaan dan memunculkan ketidakpercayaan serta ketegangan antar kelompok agama. Hal ini dapat menciptakan skenario di mana kepentingan politik dan kepentingan agama berbenturan, memicu konflik yang memperburuk situasi. Ketika agama dijadikan basis utama identitas politik, individu dan kelompok cenderung terperangkap dalam dinamika kompetisi dan konflik yang didasarkan pada identitas agama mereka. Politik yang terkait dengan identitas agama sering kali memperkuat perbedaan antara kelompok agama dan memunculkan ketidakpercayaan serta ketegangan di antara mereka. Politisasi identitas agama dapat mengarah pada terbentuknya kelompok-kelompok yang mempertahankan dan mempromosikan kepentingan agama mereka secara eksklusif, dengan menolak pengakuan dan toleransi terhadap

¹⁸Fajar, "Polarisasi Isu Agama Di Media Massa: Strategi Politik Hos Cokroaminoto Dalam Surat Kabar Djawi Hisworo (1918)," 80.

¹⁹Rahmat, "Agama Dan Konflik Sosial," 136.

²⁰Rahmat, 136.

kelompok agama lain.²¹ Dalam konteks politik yang terpolitisasi, kepentingan politik dan kepentingan agama sering kali berbenturan. Aktor politik yang menggunakan identitas agama sebagai basis utama untuk memperoleh dukungan politik sering kali memanfaatkan perbedaan agama untuk memecah belah masyarakat dan menciptakan konflik yang lebih dalam. Hal ini memperburuk situasi dan mempengaruhi stabilitas serta kerukunan antar agama.

Peran Negara dan Kebijakan Publik

Negara memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik antar agama melalui kebijakan publik yang melibatkan legislasi, penegakan hukum, promosi dialog antar agama, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai mediator dan penjaga keadilan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerukunan agama dan penyelesaian konflik yang berkeadilan. Pertama, legislasi yang tepat dapat membantu mengatur dan melindungi hak-hak agama serta mendorong toleransi dan kerukunan antar agama. Undang-undang dan peraturan yang melindungi kebebasan beragama serta melarang diskriminasi agama dapat membantu mengatasi konflik antar agama. Legislasi ini juga dapat menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk menangani kasus-kasus intoleransi atau kekerasan berbasis agama.²²

Kedua, penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau tindakan intoleransi berbasis agama ditindak dengan tegas. Polisi dan sistem peradilan harus bersikap netral dan memberikan perlindungan kepada semua warga negara tanpa memandang agama mereka. Dalam menegakkan hukum, penting bagi negara untuk menunjukkan komitmen dan keadilan dalam mengatasi kasus-kasus pelanggaran agama. Selanjutnya, promosi dialog antar agama dapat membantu membangun pemahaman saling dan mengurangi ketegangan antara kelompok agama. Negara dapat memfasilitasi dialog, pertemuan antar pemimpin agama, dan kegiatan-kegiatan yang mendorong interaksi dan kerja sama antar kelompok agama. Inisiatif ini dapat memperkuat kerukunan dan membangun kepercayaan di antara komunitas agama yang berbeda.²³ Terakhir, perlindungan hak asasi manusia adalah elemen krusial dalam menyelesaikan konflik antar agama. Negara harus menjamin kebebasan beragama, menghormati hak-hak individu dan kelompok agama, serta mencegah diskriminasi dan kekerasan berbasis agama. Negara harus memberikan perlindungan kepada kelompok agama minoritas dan melindungi mereka dari segala bentuk pelecehan, ancaman, atau kekerasan. Secara keseluruhan, peran negara dalam menyelesaikan konflik antar agama melalui kebijakan publik sangat penting. Legislasi yang adil, penegakan hukum yang tegas, promosi dialog antar agama, dan perlindungan hak asasi manusia adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh negara untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan toleran bagi semua warga negara tanpa memandang agama mereka.²⁴

Asimetri Kekuasaan Dalam Penyelesaian Konflik Antar Agama

Dalam penyelesaian konflik antar agama, seringkali terdapat asimetri kekuasaan antara kelompok agama yang terlibat. Asimetri kekuasaan merujuk pada ketidakseimbangan kekuatan politik, ekonomi, atau sosial antara kelompok agama yang berkonflik. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi dinamika penyelesaian konflik dan menciptakan tantangan yang perlu diatasi. Asimetri kekuasaan dapat timbul dalam beberapa bentuk. Pertama, ada asimetri kekuasaan politik, di mana satu kelompok agama memiliki pengaruh politik yang lebih besar atau dominan dibandingkan dengan kelompok agama lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak

²¹Hartana, "Analisis Konflik Dan Solusi Pemolisian Dalam Konflik Antar Agama Di Tanjung Balai Sumatera Utara Tahun 2016," 57.

²²Suheri Harahap, "Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)* 1, no. 2 (2018): 3–4, <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>.

²³Akbar Syamsuddin, "Konflik Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Agama," *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (2020): 4.

²⁴Syamsuddin, 65.

adil dalam pembuatan kebijakan, pengabaian terhadap hak-hak kelompok agama minoritas, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik. Asimetri kekuasaan politik dalam konteks konflik antar agama dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam pembuatan kebijakan serta perlakuan terhadap kelompok agama minoritas. Ketika satu kelompok agama memiliki pengaruh politik yang lebih besar atau dominan, mereka mungkin cenderung memperjuangkan kepentingan dan agenda mereka sendiri, sementara mengabaikan atau merugikan hak-hak kelompok agama minoritas.²⁵

Perlakuan yang tidak adil dalam pembuatan kebijakan dapat menghasilkan diskriminasi sistemik terhadap kelompok agama minoritas, seperti pengaturan hukum yang merugikan, pembatasan kebebasan beragama, atau penolakan pengakuan terhadap hak-hak mereka. Keputusan politik yang tidak memperhatikan kepentingan dan aspirasi kelompok agama minoritas dapat memperburuk ketegangan dan meningkatkan risiko konflik antar agama. Selain itu, asimetri kekuasaan politik juga bisa menjadi alasan bagi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik. Pihak yang memiliki dominasi politik dapat memanfaatkan posisi mereka untuk memperkuat kekuasaan mereka sendiri dan menekan atau menindas kelompok agama minoritas.²⁶ Praktik semacam ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, tetapi juga memperburuk ketegangan antar agama. Untuk mengatasi asimetri kekuasaan politik dalam penyelesaian konflik antar agama, penting untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan melibatkan semua kelompok agama dalam proses pengambilan keputusan politik. Mempertahankan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia adalah langkah penting dalam mengurangi asimetri kekuasaan politik. Dibutuhkan reformasi politik yang berfokus pada partisipasi publik yang merata, perlindungan hak-hak minoritas, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi untuk memastikan bahwa semua kelompok agama memiliki suara dan pengaruh yang setara dalam proses politik. Selain itu, negara harus mengadopsi kebijakan yang melindungi hak-hak agama minoritas, mencegah diskriminasi berbasis agama, dan mendorong dialog antar agama yang inklusif. Mendorong pluralisme politik, mempromosikan dialog antar agama, dan membangun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan agama dalam masyarakat dapat membantu mengurangi asimetri kekuasaan politik dan membangun kerukunan antar agama yang lebih baik. Dalam rangka mencapai penyelesaian yang berkelanjutan, upaya kolektif dan komitmen yang kuat diperlukan dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk mengatasi asimetri kekuasaan politik dalam penyelesaian konflik antar agama dan membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis.

Kedua, asimetri kekuasaan ekonomi juga dapat memperburuk konflik antar agama. Jika kelompok agama tertentu memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi atau kesempatan ekonomi, sementara kelompok lain menghadapi keterbatasan atau diskriminasi ekonomi, ketegangan dan rasa ketidakpuasan dapat meningkat. Kesenjangan ekonomi dapat menjadi sumber ketidakadilan sosial dan meningkatkan risiko konflik. Asimetri kekuasaan ekonomi dalam konteks konflik antar agama juga dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan meningkatkan risiko konflik. Ketika kelompok agama tertentu memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, atau pendapatan, sedangkan kelompok lain mengalami keterbatasan atau diskriminasi ekonomi, kesenjangan ekonomi yang signifikan dapat terbentuk.²⁷

Kesenjangan ekonomi ini dapat memperburuk ketegangan dan rasa ketidakpuasan antara kelompok agama. Ketika kelompok agama yang memiliki akses ekonomi yang lebih baik menunjukkan kemakmuran dan keunggulan ekonomi yang mencolok, kelompok agama lain yang

²⁵Muhammad Hatta, Zulfan, and Masriadi, "Peranan Tokoh Masyarakat (Tomas) Dalam Mencegah Konflik Antar Agama Di Kabupaten Aceh Singkil," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 25.

²⁶Winda Ika Pratiwi, "Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen Di Aceh Singkil Tahun 2015," *Panangaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 36, <https://doi.org/10.14421/panangaran.2020.0401-02>.

²⁷Inayatul Ulya, "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia," *Fikrah* 4, no. 1 (2016): 28, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>.

mengalami keterbatasan ekonomi dapat merasa terpinggirkan, tidak adil, dan tidak setara. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan, ketegangan, dan rasa ketidakadilan sosial yang memicu konflik antar agama. Selain itu, kesenjangan ekonomi juga dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan pengembangan diri. Kelompok agama yang mengalami keterbatasan ekonomi mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan yang memadai, atau kesempatan kerja yang layak. Ini dapat memperkuat perbedaan sosial dan ekonomi antar kelompok agama, menciptakan ketidaksetaraan yang lebih dalam, dan meningkatkan ketegangan serta risiko konflik.²⁸ Negara harus berupaya untuk memerangi diskriminasi ekonomi berbasis agama dan mempromosikan kesetaraan akses terhadap lapangan kerja, peluang usaha, dan sumber daya ekonomi. Inisiatif pemberdayaan ekonomi yang melibatkan kelompok agama minoritas dapat membantu mengurangi asimetri kekuasaan ekonomi dan mendorong kerja sama antar agama. Di samping itu, promosi kewirausahaan dan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif juga dapat memberikan kesempatan bagi kelompok agama yang terpinggirkan untuk berkontribusi secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Langkah-langkah ini harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas terhadap diskriminasi ekonomi dan perlindungan hak ekonomi setiap kelompok agama.

Ketiga, asimetri kekuasaan sosial yang terkait dengan perbedaan akses terhadap pendidikan, media, atau lembaga sosial lainnya. Jika satu kelompok agama mendominasi sektor-sektor ini, sementara kelompok lain terpinggirkan atau diabaikan, maka dapat terjadi polarisasi, stereotip negatif, dan diskriminasi yang memicu konflik antar agama. Asimetri kekuasaan sosial dalam konteks konflik antar agama dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko konflik. Ketika satu kelompok agama mendominasi akses terhadap pendidikan, media, atau lembaga sosial lainnya, sementara kelompok agama lain mengalami keterbatasan atau pengabaian, kesenjangan sosial yang signifikan dapat terbentuk.²⁹ Untuk mengatasi asimetri kekuasaan sosial dalam penyelesaian konflik antar agama, penting untuk mempromosikan inklusivitas, partisipasi, dan kesetaraan akses dalam pendidikan, media, dan lembaga sosial. Pemerintah harus melibatkan semua kelompok agama dalam pembuatan kebijakan pendidikan yang inklusif dan adil, serta memastikan bahwa kurikulum dan materi pembelajaran mencerminkan keragaman agama dan budaya. Selain itu, penting untuk mendorong keberagaman dalam media dengan memberikan ruang untuk suara dan perspektif kelompok agama minoritas, serta menghindari penyebaran stereotip negatif atau diskriminatif. Pembangunan lembaga sosial yang inklusif dan representatif, serta partisipasi aktif dari semua kelompok agama dalam kegiatan sosial dan pengambilan keputusan, juga penting untuk mengurangi asimetri kekuasaan sosial. Upaya kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan kelompok agama harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua kelompok agama memiliki akses yang setara dan pengaruh yang merata dalam pendidikan, media, dan lembaga sosial. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati keberagaman agama, konflik antar agama dapat diminimalisir, dan perdamaian serta kerukunan antar agama dapat diperkuat.

Perbedaan akses terhadap pendidikan dapat menciptakan kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan peluang bagi kelompok agama minoritas. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pengembangan pribadi, peluang kerja, dan mobilitas sosial, sehingga meningkatkan rasa ketidakpuasan dan ketegangan antar agama. Selain itu, asimetri kekuasaan sosial dalam akses terhadap media juga berdampak signifikan. Jika satu kelompok agama memiliki kontrol yang dominan atau lebih besar dalam media, mereka dapat mempengaruhi narasi dan persepsi publik tentang agama, memunculkan stereotip negatif, atau mengabaikan suara dan perspektif kelompok agama minoritas. Hal ini dapat menciptakan polarisasi sosial, meningkatkan ketegangan, dan memperburuk konflik antar agama. Asimetri kekuasaan sosial juga dapat terlihat dalam akses dan pengaruh terhadap lembaga sosial, seperti organisasi masyarakat, lembaga

²⁸Saefuddin, "Memahami Konflik Antar Iman: Menyikapi Perbedaan Sebagai 'Rahmat' Dan Bukan 'Konflik,'" 17.

²⁹Harahap, "Konflik Etnis dan Agama Di Indonesia," 9.

keagamaan, atau lembaga sosial lainnya. Jika satu kelompok agama mendominasi atau memiliki kontrol yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga ini, kelompok agama minoritas mungkin merasa diabaikan, dikekang, atau tidak diakui dalam pengambilan keputusan atau kegiatan sosial. Hal ini dapat memicu rasa ketidakadilan, ketegangan, dan meningkatkan risiko konflik antar agama.³⁰

Media dan komunikasi memainkan peran penting dalam membentuk narasi, persepsi, dan konstruksi konflik antar agama. Melalui media, informasi dan pesan tentang konflik antar agama dapat disebarkan kepada masyarakat secara luas. Penggunaan media yang tidak bertanggung jawab atau tendensius dapat memperkuat polarisasi, memunculkan stereotip negatif, dan memperburuk konflik. Salah satu dampak yang signifikan dari media adalah pembentukan narasi tentang konflik antar agama. Media memiliki kekuatan untuk memilih dan mengatur berita serta menyampaikan sudut pandang tertentu. Narasi yang dibangun oleh media dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap konflik antar agama, baik secara positif maupun negatif. Jika media cenderung memperlihatkan sisi negatif dan memperkuat perbedaan, hal ini dapat memperburuk konflik.³¹ Namun, media juga dapat menjadi alat untuk mempromosikan pemahaman, dialog, dan rekonsiliasi antar agama jika dijalankan dengan etika dan tanggung jawab. Selain itu, media sosial juga memiliki peran yang signifikan dalam konstruksi konflik antar agama. Dengan kemampuan berbagi informasi secara cepat dan luas, media sosial dapat menjadi platform di mana narasi yang memicu konflik dapat dengan mudah menyebar. Diseminasi informasi yang salah atau provokatif dapat memperburuk ketegangan dan meningkatkan risiko konflik antar agama. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial dilakukan dengan bertanggung jawab, memeriksa keabsahan informasi, dan mempromosikan dialog yang konstruktif.³² Namun, media dan komunikasi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam penyelesaian konflik antar agama. Mereka dapat menjadi sarana untuk mempromosikan dialog antar agama, membangun pemahaman saling, dan mengedukasi masyarakat tentang keragaman agama. Melalui liputan yang berimbang, penggunaan sumber yang dapat dipercaya, dan penyampaian informasi yang akurat, media dapat membantu mengurangi polarisasi dan mendorong kerja sama antar agama. Selain itu, media juga dapat memberikan ruang bagi narasi kelompok agama minoritas dan mempromosikan keadilan serta toleransi.³³

Pendidikan agama juga memainkan peran penting dalam mengurangi konflik antar agama dan mempromosikan kerukunan serta dialog antar agama yang harmonis. Pada dasarnya, pendidikan agama yang mempromosikan toleransi dapat membantu mengurangi konflik antar agama. Melalui pendekatan yang inklusif dan dialogik, pendidikan agama dapat mengajarkan nilai-nilai universal seperti penghormatan terhadap perbedaan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan pentingnya menghargai kebebasan beragama. Dengan memperkuat pemahaman tentang keberagaman agama dan membangun rasa saling menghargai, individu akan cenderung lebih menerima dan menghormati keberadaan agama lain, sehingga mengurangi potensi konflik. Pendidikan agama juga dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang agama-agama yang ada. Dengan mempelajari ajaran, praktik, sejarah, dan nilai-nilai yang mendasari agama-agama tersebut, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama. Pemahaman yang mendalam ini dapat membantu mengatasi stereotip negatif dan prasangka antar agama yang sering kali menjadi sumber konflik. Melalui pendidikan agama yang menyediakan pengetahuan yang akurat dan objektif, individu dapat membangun perspektif yang

³⁰Hatta, Zulfan, and Masriadi, "Peranan Tokoh Masyarakat (Tomas) Dalam Mencegah Konflik Antar Agama Di Kabupaten Aceh Singkil," 20.

³¹Hatta, Zulfan, and Masriadi, 24.

³²Rizak, "Peran Pola Komunikasi Antarbudaya Dalam Mencegah Konflik Antar Kelompok Agama," 96.

³³Fajar, "Politisasi Isu Agama Di Media Massa: Strategi Politik Hos Cokroaminoto Dalam Surat Kabar Djawi Hisworo (1918)," 80.

lebih inklusif dan menyadari bahwa nilai-nilai dasar agama-agama memiliki kesamaan yang lebih besar daripada perbedaannya.³⁴

Pendidikan agama yang mendorong dialog antar agama merupakan langkah penting dalam meredakan konflik. Dialog antar agama membuka ruang bagi individu dari berbagai agama untuk berkomunikasi, berbagi pengalaman, dan memahami sudut pandang satu sama lain. Melalui dialog yang terbuka dan saling menghormati, kesalahpahaman dapat diatasi, perspektif dapat diperluas, dan kerja sama dapat terjalin. Pentingnya pendidikan agama yang mempromosikan toleransi, pemahaman, dan dialog antar agama tidak dapat diabaikan dalam upaya menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang mendorong inklusivitas dan pemahaman yang mendalam tentang agama-agama. Selain itu, diperlukan penguatan pelatihan bagi para pendidik agama untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya toleransi, pemahaman, dan dialog antar agama. Melalui upaya kolaboratif ini, pendidikan agama dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi konflik antar agama dan membangun masyarakat yang berlandaskan kerukunan serta saling menghormati dalam keberagaman agama.³⁵

Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Agama

Dalam penyelesaian konflik antar agama, berbagai mekanisme dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian, membangun pemahaman, dan memperbaiki hubungan yang rusak. Berikut adalah beberapa mekanisme yang umum digunakan dalam penyelesaian konflik antar agama: Pertama, dialog antar agama adalah mekanisme yang efektif untuk memfasilitasi komunikasi terbuka dan saling pengertian antara pihak yang terlibat dalam konflik. Dialog antar agama menciptakan ruang bagi pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai agama untuk bertemu, berdiskusi, dan membangun kesepahaman. Melalui dialog, perbedaan dan perspektif yang berbeda dapat diungkapkan, dan kesalahpahaman serta prasangka dapat diatasi. Dialog antar agama juga dapat menghasilkan solusi kolaboratif yang mampu mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan antar kelompok agama.³⁶

Dialog antar agama menciptakan ruang aman di mana pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai agama dapat bertemu dan berdiskusi secara terbuka. Melalui dialog, perbedaan dan perspektif yang berbeda dapat diungkapkan dengan penuh pengertian dan saling menghormati. Dialog antar agama memainkan peran penting dalam mengatasi kesalahpahaman dan prasangka yang mungkin ada antara kelompok agama. Dalam suasana dialog yang terbuka, kesalahpahaman dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik. Perspektif yang berbeda dapat diungkapkan, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai, keyakinan, dan praktik-praktik agama masing-masing. Melalui dialog antar agama, juga dimungkinkan adanya kolaborasi dalam mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dalam suasana saling mendengarkan dan memahami, kelompok agama dapat bekerja sama untuk mencari titik kesepakatan yang dapat mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Solusi kolaboratif yang dihasilkan dari dialog antar agama memiliki potensi untuk membangun kerukunan, mengurangi ketegangan, dan mempromosikan keadilan. Selain itu, dialog antar agama juga berfungsi sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman tentang agama-agama yang berbeda. Melalui dialog ini, anggota kelompok agama dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang ajaran, praktik, dan nilai-nilai agama lain. Hal ini membantu dalam memecah prasangka dan membangun rasa saling menghormati dan toleransi antara kelompok agama. Dalam keseluruhan, dialog antar agama merupakan mekanisme penting dalam mengatasi konflik antar

³⁴Tular and Manik, "Pendidikan Perdamaian Bagi Remaja: Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik Antar Umat Beragama," 48.

³⁵Tular and Manik, 54.

³⁶Pratiwi, "Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen Di Aceh Singkil Tahun 2015,"

agama dan memperbaiki hubungan yang rusak. Melalui dialog yang terbuka dan saling menghormati, perbedaan dan perspektif yang berbeda dapat dihargai dan dipahami dengan lebih baik. Dalam suasana dialog yang mempromosikan pemahaman, kerja sama, dan perdamaian, dialog antar agama berpotensi menciptakan perubahan positif dalam masyarakat yang beragam agama.³⁷

Kedua, rekonsiliasi adalah mekanisme penting dalam penyelesaian konflik antar agama. Rekonsiliasi melibatkan upaya untuk membangun kembali hubungan yang rusak dan mengatasi trauma serta ketidakadilan yang terjadi akibat konflik. Ini melibatkan pengakuan dan permintaan maaf atas kerugian yang terjadi, pengembalian keadilan, dan pembangunan kepercayaan antara kelompok agama yang terlibat. Rekonsiliasi membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk berdamai, memperbaiki hubungan, dan bekerja menuju masa depan yang lebih baik. Konflik antar agama sering kali meninggalkan bekas luka yang mendalam dan memisahkan kelompok-kelompok agama yang terlibat. Rekonsiliasi bertujuan untuk membangun kembali hubungan yang rusak dan mengatasi trauma serta ketidakadilan yang terjadi akibat konflik tersebut.³⁸

Rekonsiliasi melibatkan serangkaian langkah yang meliputi pengakuan dan permintaan maaf atas kerugian yang terjadi. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus bersedia mengakui kesalahan dan melibatkan proses permohonan maaf yang tulus. Pengakuan ini penting untuk memulai proses penyembuhan dan memperbaiki hubungan yang terganggu. Selain itu, rekonsiliasi juga melibatkan restorasi keadilan. Upaya harus dilakukan untuk mengembalikan hak-hak yang dilanggar dan mengganti kerugian yang terjadi. Hal ini dapat melibatkan pemulihan harta benda, restitusi, atau upaya kompensasi yang adil kepada pihak yang terkena dampak konflik. Pembangunan kepercayaan juga menjadi elemen kunci dalam rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi harus membangun kepercayaan yang erat antara kelompok agama yang terlibat. Ini dapat dicapai melalui dialog, kolaborasi dalam proyek-proyek bersama, dan pembangunan kerja sama yang memperkuat hubungan antar kelompok agama. Rekonsiliasi membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Ini melibatkan keberanian untuk berdamai, memperbaiki hubungan yang rusak, dan bekerja bersama menuju masa depan yang lebih baik. Proses rekonsiliasi membutuhkan waktu, kesabaran, dan upaya yang konsisten dari semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan melibatkan pengakuan, permintaan maaf, restorasi keadilan, dan pembangunan kepercayaan, rekonsiliasi memungkinkan kelompok agama yang terlibat untuk memulihkan hubungan yang rusak dan bekerja bersama dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.³⁹

Ketiga, mediasi adalah mekanisme yang melibatkan pihak ketiga netral untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak yang terlibat dalam konflik. Mediator bertindak sebagai penghubung dan membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks konflik antar agama, mediasi dapat membantu mengurangi ketegangan, mencari titik kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, dan membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Mediasi juga dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin sulit untuk diselesaikan secara langsung. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral dan tidak terlibat langsung dalam konflik, disebut mediator, berperan sebagai penghubung antara pihak yang terlibat. Mediator bertugas untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.⁴⁰

Peran utama mediator dalam mediasi konflik antar agama adalah membangun komunikasi yang efektif dan saling mendengarkan di antara para pihak. Mediator membantu mengidentifikasi isu-isu yang menjadi sumber konflik dan mendorong pihak-pihak untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam konteks konflik antar agama, mediator yang memahami kerangka nilai dan keyakinan agama yang berbeda dapat membantu mengelola perbedaan dan

³⁷Abdul Halim, "Pluralisme Dan Dialog Antar Agama," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2015): 37–39, <https://doi.org/10.30631/tjd.v14i1.21>.

³⁸Saefuddin, "Memahami Konflik Antar Iman: Menyikapi Perbedaan Sebagai 'Rahmat' Dan Bukan 'Konflik,'" 2–3.

³⁹Rahmat, "Agama Dan Konflik Sosial," 142.

⁴⁰Harahap, "Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia," 2–3.

menemukan titik kesepakatan yang menghormati kepentingan dan kepercayaan semua pihak. Mediasi juga memberikan ruang yang aman bagi para pihak untuk membahas isu-isu yang sensitif dan emosional. Dalam suasana mediasi, para pihak dapat secara terbuka menyampaikan kekhawatiran, ketidakpuasan, dan aspirasi mereka tanpa takut adanya konfrontasi langsung. Hal ini membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk menemukan solusi yang memadai. Keuntungan lain dari mediasi adalah kemampuannya untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin sulit diselesaikan secara langsung. Beberapa konflik antar agama melibatkan isu-isu yang rumit dan kompleks, dan mediasi dapat membantu mengurai kompleksitas tersebut dengan cara yang terstruktur dan terarah. Mediator yang terampil dan berpengalaman dapat membantu para pihak mengeksplorasi opsi-opsi yang mungkin belum mereka pertimbangkan sebelumnya, serta mendorong kolaborasi dan kreativitas dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, mediasi membantu memfasilitasi dialog, negosiasi, dan pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak. Melalui mediasi, konflik antar agama dapat diselesaikan dengan cara yang damai, mengurangi ketegangan, dan membangun kerja sama yang lebih baik di masa depan.⁴¹

Keempat, pendekatan *restorative justice* melibatkan upaya untuk memulihkan keseimbangan, memperbaiki kerusakan, dan memperbaiki hubungan antar kelompok agama yang terlibat dalam konflik. Pendekatan ini berfokus pada proses restorasi, rekompensasi yang adil, dan dialog antara korban dan pelaku konflik. Pendekatan *restorative justice* memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan pengalaman mereka, sementara pelaku konflik dapat mengakui dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini membantu membangun empati, pemahaman, dan rekonsiliasi di antara kelompok agama yang terlibat.⁴² Salah satu prinsip utama dalam pendekatan *restorative justice* adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung. Melalui dialog yang terbuka dan terstruktur, korban dapat mengungkapkan perasaan, trauma, dan kerugian yang mereka alami akibat konflik. Hal ini memberikan ruang bagi korban untuk merasakan bahwa pengalaman mereka diakui dan dihormati. Pendekatan *restorative justice* juga mendorong pelaku konflik untuk mengakui dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam proses ini, pelaku dihadapkan pada dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya terhadap korban dan komunitas. Dengan mengakui kesalahan dan menerima tanggung jawab, pelaku diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan dan memperbaiki hubungan yang rusak.⁴³

Pendekatan *restorative justice* juga memberikan peran penting kepada masyarakat dan komunitas dalam proses rekonsiliasi. Masyarakat diminta untuk mendukung dan melibatkan diri dalam proses restorasi, sehingga memberikan kesempatan bagi kelompok agama yang terlibat untuk saling mendengar, membangun empati, dan memperbaiki hubungan. Melalui dialog dan kerja sama yang konstruktif, pendekatan *restorative justice* membantu membangun pemahaman, rekonsiliasi, dan perdamaian yang berkelanjutan. Pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik antar agama terletak pada fokusnya pada pemulihan, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan di antara kelompok agama yang terlibat. Dengan memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman mereka, serta mendorong pengakuan dan tanggung jawab dari pelaku konflik, pendekatan ini dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik, mempromosikan empati, dan memperbaiki hubungan yang rusak. Melalui proses restorasi dan rekompensasi yang adil, pendekatan *restorative justice* membawa harapan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan berdamai. Dalam penyelesaian konflik antar agama,

⁴¹Pratiwi, "Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen Di Aceh Singkil Tahun 2015," 40-41.

⁴²Habibul Umam Taqiuddin and Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3597, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2972>.

⁴³Muhaimin Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 205, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>.

setiap mekanisme memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang cocok untuk semua situasi. Kombinasi dan adaptasi mekanisme tersebut sesuai dengan konteks dan karakteristik konflik yang ada dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam mempromosikan perdamaian, memperbaiki hubungan, dan mendorong dialog antar agama yang saling menguntungkan.

Kesimpulan

Dinamika kekuasaan memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik antar agama. Konflik antar agama sering kali melibatkan perebutan kekuasaan, pengaruh politik, dan persaingan antar kelompok agama. Konflik antar agama sering kali terkait dengan persaingan politik di antara kelompok agama yang berbeda. Partai politik atau kelompok masyarakat tertentu mungkin menggunakan identitas agama untuk memperoleh kekuasaan politik. Dinamika kekuasaan politik ini dapat memperdalam konflik antar agama. Pada dasarnya, peran negara dalam penyelesaian konflik antar agama dapat menjadi faktor penentu. Negara memiliki kekuatan untuk menciptakan kerangka kerja hukum dan kebijakan yang mempengaruhi hubungan antar agama. Penggunaan kekuasaan oleh negara untuk mendorong dialog, toleransi, dan keadilan dapat membantu meredakan konflik dan menciptakan kehidupan beragama yang harmonis. Tokoh-tokoh agama juga memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat dan sering kali menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar agama. Dinamika kekuasaan dalam kepemimpinan agama dapat memengaruhi pendekatan mereka dalam mengelola konflik dan memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi. Selanjutnya, ketidakseimbangan kekuasaan antara kelompok agama yang berkonflik juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Salah satu kelompok agama yang memiliki dominasi politik, ekonomi, atau sosial dapat mengeksploitasi kekuasaannya dan menindas kelompok agama minoritas. Hal ini dapat memperburuk konflik antar agama dan menyulitkan penyelesaiannya. Dalam penyelesaian konflik antar agama, penting untuk memahami dan mengelola dinamika kekuasaan yang terlibat. Mengakui kepentingan politik, kepemimpinan agama, dan upaya negara dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil dapat membantu meredakan konflik dan membangun kerukunan antar agama yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Bahtiar Effendy. "Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Politi Islam Di Indonesia," 1998, 273–309.
- BM, St. Aisyah. "Konflik Sosial Dalam Hubunga Antar Umat Beragama." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): 189–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>.
- Fajar, Ahmad. "Politisasi Isu Agama Di Media Massa: Strategi Politik Hos Cokroaminoto Dalam Surat Kabar Djawi Hisworo (1918)." *Journal of Islamic History* 1, no. 1 (2021): 78–100. <https://doi.org/10.53088/jih.v1i1.115>.
- Halim, Abdul. "Pluralisme Dan Dialog Antar Agama." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2015): 35–62. <https://doi.org/10.30631/tjd.v14i1.21>.
- Harahap, Suheri. "Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)* 1, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>.
- Hartana, I Made Redi. "Analisis Konflik Dan Solusi Pemolisian Dalam Konflik Antar Agama Di Tanjung Balai Sumatera Utara Tahun 2016." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. April (2017): 55–63. <http://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/98>.
- Hatta, Muhammad, Zulfan, and Masriadi. "Peranan Tokoh Masyarakat (Tomas) Dalam Mencegah Konflik Antar Agama Di Kabupaten Aceh Singkil." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 93.

- Huda, Muhammad Chairul. "Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan Dalam Upaya Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018): 78–99. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160>.
- Husin, Khairah. "Peran Mukti Ali Dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama Di Indonesia." *Jurnal Ushuluddin* 21, no. 1 (2014): 101–20. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/729>.
- Justisia, Vita. "Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 2, no. 2 (2018): 149–61. <https://doi.org/10.19109/jssp.v2i2.4058>.
- Muhaimin, Muhaimin. "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 185. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>.
- Pratiwi, Winda Ika. "Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen Di Aceh Singkil Tahun 2015." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 27–47. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0401-02>.
- Rahmat, Stephanus Turibus. "Agama Dan Konflik Sosial." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio* 8, no. 1 (2016): 132–43.
- Rizak, Mochamad. "Peran Pola Komunikasi Antarbudaya Dalam Mencegah Konflik Antar Kelompok Agama." *Islamic Communication Journal* 3, no. 1 (2018): 88. <https://doi.org/10.21580/icj.2018.3.1.2680>.
- Saefuddin, Taufiq. "Memahami Konflik Antar Iman: Menyikapi Perbedaan Sebagai 'Rahmat' Dan Bukan 'Konflik.'" *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial Dan Agama* 1, no. 02 (2015). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/adyan/article/view/1331>.
- Syamsuddin, Akbar. "Konflik Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Agama." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (2020): 1–14.
- Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 2598–9944. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2972>.
- Tular, Nadia Illsye, and Jefri Susanto Manik. "Pendidikan Perdamaian Bagi Remaja: Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik Antar Umat Beragama." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 5, no. 1 (2022): 40–57. <https://doi.org/10.34081/fidei.v5i1.228>.
- Ulya, Inayatul. "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia." *Fikrah* 4, no. 1 (2016): 20. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>.
- Yasin, Taslim HM. "Membangun Hubungan Antar Agama Mewujudkan Dialog Dan Kerjasama." *Jurnal Substantia* 12, no. 1 (2011): 85–91.
- Yunus, Firdaus M. "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya." *Substantia* 16, no. 2 (2014): 217–28.